



**BERITA ACARA**  
HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN BAKAL  
CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh bulan Juli Tahun dua ribu delapan belas, KPU Provinsi DKI Jakarta telah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan terhadap dokumen syarat pengajuan bakal calon Anggota DPRD Provinsi dari **Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)** pada 10 (sepuluh) daerah pemilihan, dengan hasil verifikasi sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disampaikan kepada:

1. Satu rangkap untuk Partai Politik Peserta Pemilu;
2. Satu rangkap untuk KPU PROVINSI.

Jakarta, 20 Juli 2018

**KPU PROVINSI DKI JAKARTA**

1. Ketua : BETTY EPSILON IDROOS
2. Anggota : DETI KURNIAWATI
3. Anggota : MARLINA
4. Anggota : MUHAIMIN
5. Anggota : NURDIN
6. Anggota : PARTONO
7. Anggota : SUNARDI







NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN & KEABSAHAN DOKUMEN																							
		CALON 1		CALON 2		CALON 3		CALON 4		CALON 5		CALON 6		CALON 7		CALON 8		CALON 9		CALON 10		CALON 11		CALON 12	
		ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
19.	Bagi calon yang berstatus sebagai mantan terpidana:																								
	a. Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.																								
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.																								
	c. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana.																								
	d. Bukti berupa surat pernyataan yang telah dimuat dalam media massa.																								
20.	Bagi bakal calon yang berstatus sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara ( <i>culpa levis</i> atau karena alasan politik):																								
	a. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan																								
	b. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan ( <i>culpa levis</i> ) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;																								
	c. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana;																								
	d. Bukti pernyataan atau pengumuman yang dimuat di media massa lokal atau nasional.																								
21.	Fotocopy ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan bagi bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah atas atau sederajat.					ADA	BMS																		
<b>KESIMPULAN:</b>		<b>TL</b>	<b>BMS</b>	<b>TL</b>	<b>BMS</b>	<b>TL</b>	<b>BMS</b>	<b>TL</b>	<b>BMS</b>	<b>TL</b>	<b>BMS</b>	<b>TL</b>	<b>BMS</b>	<b>TL</b>	<b>BMS</b>	<b>TL</b>	<b>BMS</b>	<b>TL</b>	<b>BMS</b>	<b>TL</b>	<b>BMS</b>	<b>TL</b>	<b>BMS</b>	<b>TL</b>	<b>BMS</b>

**Keterangan:**  
**L** : Lengkap  
**TL** : Tidak Lengkap  
**MS** : Memenuhi Syarat  
**BMS** : Belum Memenuhi Syarat

Jakarta, 20 Juli 2018  
Ketua Pokja Pencalonan  
  
ttd.  
(NURDIN)



14.	<p>Bagi bakal calon yang berstatus sebagai anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab./Kota yang dicalonkan partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu sebelumnya:</p> <p>a. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR/DPRD Provinsi, dan DPRD Kab./Kota</p> <p>b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri.</p> <p>c. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.</p>
15.	<p>Bagi bakal calon yang berstatus sebagai anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab./Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu sebelumnya tetapi yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kab./Kota wajib menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politik yang diwakili pada pemilu sebelumnya.</p>
16.	<p>Bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri:</p> <p>a. Paspor.</p> <p>b. Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan RI di negara setempat.</p>
17.	<p>Keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu serta Panitia Pemilu dan Panitia Pengawas.</p>
18.	<p>Bagi calon yang berstatus sebagai gubernur/wakil gubernu/bupati/wakil bupati/walikota/wakil walikota/Kepala Desa/perangkat desa/aparatur sipil negara/anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian/direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada BUMN/BUMD/BUMDes badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara*):</p> <p>a. Surat pengajuan pengunduran diri.</p> <p>b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri.</p> <p>c. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.</p>

19.	Bagi calon yang berstatus sebagai mantan terpidana:																																									
a.	Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.																																									
b.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.																																									
c.	Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana.																																									
d.	Bukti berupa surat pernyataan yang telah dimuat dalam media massa.																																									
20.	Bagi bakal calon yang berstatus sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara ( <i>culpa levis</i> atau karena alasan politik):																																									
a.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan																																									
b.	Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan ( <i>culpa levis</i> ) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;																																									
c.	Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana;																																									
d.	Bukti pernyataan atau pengumuman yang dimuat di media massa lokal atau nasional.																																									
21.	Fotocopy ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan bagi bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah atas atau sederajat.																																									
<b>KESIMPULAN:</b>		<b>L</b>	<b>MS</b>	<b>TL</b>	<b>BMS</b>	<b>L</b>	<b>MS</b>	<b>L</b>	<b>BMS</b>	<b>L</b>	<b>MS</b>	<b>TL</b>	<b>BMS</b>	<b>L</b>	<b>BMS</b>	<b>TL</b>	<b>BMS</b>	<b>TL</b>	<b>BMS</b>	<b>TL</b>	<b>BMS</b>																					

**Keterangan:**  
**L** : Lengkap  
**TL** : Tidak Lengkap  
**MS** : Memenuhi Syarat  
**BMS** : Belum Memenuhi Syarat

Jakarta, 20 Juli 2018  
Ketua Pokja Pencalonan  
  
ttd  
(NURDIN)

**LAMPIRAN BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

LAMPIRAN  
MODEL BA.HP.DPRD PROVINSI

**PARTAI  
DAPIL**

: GERINDRA  
: DKI JAKARTA 3

**DOKUMEN SYARAT BAKAL CALON**

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN & KEABSAHAN DOKUMEN																							
		CALON 1		CALON 2		CALON 3		CALON 4		CALON 5		CALON 6		CALON 7		CALON 8		CALON 9		CALON 10		CALON 11		CALON 12	
		ADA/ TDK ADA	MS/ B MS	ADA/ TDK ADA	MS/ B MS	ADA/ TDK ADA	MS/ B MS	ADA/ TDK ADA	MS/ B MS	ADA/ TDK ADA	MS/ B MS	ADA/ TDK ADA	MS/ B MS	ADA/ TDK ADA	MS/ B MS	ADA/ TDK ADA	MS/ B MS	ADA/ TDK ADA	MS/ B MS	ADA/ TDK ADA	MS/ B MS	ADA/ TDK ADA	MS/ B MS	ADA/ TDK ADA	MS/ B MS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Formulir Model BB1 DPRD Provinsi.	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS						
2.	Fotocopy KTP Elektronik WNI.	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS						
3.	Fotocopy Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.	ADA	MS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	ADA	BMS	ADA	BMS	ADA	BMS	TDK ADA	BMS	ADA	BMS	ADA	MS						
4.	Surat keterangan sehat jasmani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah.	ADA	BMS	ADA	MS	ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS						
5.	Surat keterangan sehat rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah.	ADA	BMS	ADA	MS	ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	TDK ADA	BMS						
6.	Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikoterapika, dan zat adiktif dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah atau BNN Prov/BNN Kab./Kota.	ADA	BMS	ADA	MS	ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS						
7.	Fotocopy Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang Masih Berlaku.	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS						
8.	Tanda bukti sudah terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU Kabupaten/Kota	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS						
9.	Formulir Model BB2 DPRD Provinsi.	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS						
10.	Pas foto berwarna terbaru bakal calon, ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk naskah asli ( <i>hardcopy</i> ) dan naskah asli elektronik ( <i>softcopy</i> ).	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS						
11.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian.	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	TDK ADA	BMS						
12.	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS						
13.	Penetapan dari Pengadilan dalam hal terdapat perbedaan nama penulisan bakal calon pada dokumen pengajuan/syarat bakal calon dengan nama bakal calon pada KTP Elektronik.	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS						







**LAMPIRAN BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**  
**PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

LAMPIRAN  
 MODEL BA.HP.DPRD PROVINSI

**PARTAI**  
**DAPIL**

: GERINDRA  
 : DKI JAKARTA 4

**DOKUMEN SYARAT BAKAL CALON**

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN & KEABSAHAN DOKUMEN																							
		CALON 1		CALON 2		CALON 3		CALON 4		CALON 5		CALON 6		CALON 7		CALON 8		CALON 9		CALON 10		CALON 11		CALON 12	
		ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Formulir Model BB1 DPRD Provinsi.	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS				
2.	Fotocopy KTP Elektronik WNI.	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS				
3.	Fotocopy Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.	ADA	MS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS				
4.	Surat keterangan sehat jasmani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah.	ADA	MS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	TDK ADA	BMS				
5.	Surat keterangan sehat rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah.	ADA	MS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	TDK ADA	BMS				
6.	Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikoterapika, dan zat adiktif dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah atau BNN Prov/BNN Kab./Kota.	TDK ADA	BMS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	BMS	ADA	MS	TDK ADA	BMS				
7.	Fotocopy Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang Masih Berlaku.	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS				
8.	Tanda bukti sudah terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU Kabupaten/Kota	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	BMS	ADA	MS				
9.	Formulir Model BB2 DPRD Provinsi.	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS				
10.	Pas foto berwarna terbaru bakal calon, ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk naskah asli ( <i>hardcopy</i> ) dan naskah asli elektronik ( <i>softcopy</i> ).	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS				
11.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian.	ADA	MS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	BMS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS				
12.	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.	TDK ADA	BMS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	BMS	ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS				
13.	Penetapan dari Pengadilan dalam hal terdapat perbedaan nama penulisan bakal calon pada dokumen pengajuan/syarat bakal calon dengan nama bakal calon pada KTP Elektronik.	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS				





**LAMPIRAN BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

LAMPIRAN  
MODEL BA.HP.DPRD PROVINSI

**PARTAI  
DAPIL**

: GERINDRA  
: DKI JAKARTA 5

**DOKUMEN SYARAT BAKAL CALON**

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN & KEABSAHAN DOKUMEN																							
		CALON 1		CALON 2		CALON 3		CALON 4		CALON 5		CALON 6		CALON 7		CALON 8		CALON 9		CALON 10		CALON 11		CALON 12	
		ADA/ TDK ADA	MS/ B MS	ADA/ TDK ADA	MS/ B MS	ADA/ TDK ADA	MS/ B MS	ADA/ TDK ADA	MS/ B MS	ADA/ TDK ADA	MS/ B MS	ADA/ TDK ADA	MS/ B MS	ADA/ TDK ADA	MS/ B MS	ADA/ TDK ADA	MS/ B MS	ADA/ TDK ADA	MS/ B MS	ADA/ TDK ADA	MS/ B MS	ADA/ TDK ADA	MS/ B MS	ADA/ TDK ADA	MS/ B MS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Formulir Model BB1 DPRD Provinsi.	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS				
2.	Fotocopy KTP Elektronik WNI.	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS				
3.	Fotocopy Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.	ADA	BMS	ADA	BMS	ADA	BMS	ADA	BMS	ADA	BMS	ADA	MS	ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS				
4.	Surat keterangan sehat jasmani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah.	ADA	MS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS				
5.	Surat keterangan sehat rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah.	ADA	MS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	BMS	TDK ADA	BMS				
6.	Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikoterapika, dan zat adiktif dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah atau BNN Prov/BNN Kab./Kota.	ADA	MS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	BMS	ADA	MS				
7.	Fotocopy Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang Masih Berlaku.	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS				
8.	Tanda bukti sudah terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU Kabupaten/Kota	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS				
9.	Formulir Model BB2 DPRD Provinsi.	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS				
10.	Pas foto berwarna terbaru bakal calon, ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk naskah asli ( <i>hardcopy</i> ) dan naskah asli elektronik ( <i>softcopy</i> ).	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS				
11.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian.	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS				
12.	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS				
13.	Penetapan dari Pengadilan dalam hal terdapat perbedaan nama penulisan bakal calon pada dokumen pengajuan/syarat bakal calon dengan nama bakal calon pada KTP Elektronik.	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS				







**LAMPIRAN BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**  
**PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

LAMPIRAN  
 MODEL BA.HP.DPRD PROVINSI

**PARTAI**  
**DAPIL**

: GERINDRA  
 : DKI JAKARTA 6

**DOKUMEN SYARAT BAKAL CALON**

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN & KEABSAHAN DOKUMEN																							
		CALON 1		CALON 2		CALON 3		CALON 4		CALON 5		CALON 6		CALON 7		CALON 8		CALON 9		CALON 10		CALON 11		CALON 12	
		ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Formulir Model BB1 DPRD Provinsi.	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS				
2.	<i>Fotocopy</i> KTP Elektronik WNI.	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS				
3.	<i>Fotocopy</i> Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.	ADA	MS	ADA	MS	ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	BMS	ADA	BMS				
4.	Surat keterangan sehat jasmani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah.	ADA	BMS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS				
5.	Surat keterangan sehat rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah.	ADA	BMS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	BMS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS				
6.	Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba, psikoterapika, dan zat adiktif dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah atau BNN Prov/BNN Kab./Kota.	ADA	BMS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	BMS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS				
7.	<i>Fotocopy</i> Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang Masih Berlaku.	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS				
8.	Tanda bukti sudah terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU Kabupaten/Kota	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS				
9.	Formulir Model BB2 DPRD Provinsi.	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS				
10.	Pas foto berwarna terbaru bakal calon, ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk naskah asli ( <i>hardcopy</i> ) dan naskah asli elektronik ( <i>softcopy</i> ).	TDK ADA	BMS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS				
11.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian.	ADA	BMS	TDK ADA	BMS	ADA	BMS	ADA	MS	ADA	BMS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	BMS				
12.	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS				
13.	Penetapan dari Pengadilan dalam hal terdapat perbedaan nama penulisan bakal calon pada dokumen pengajuan/syarat bakal calon dengan nama bakal calon pada KTP Elektronik.	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS				



NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN & KEABSAHAN DOKUMEN																							
		CALON 1		CALON 2		CALON 3		CALON 4		CALON 5		CALON 6		CALON 7		CALON 8		CALON 9		CALON 10		CALON 11		CALON 12	
		ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS	ADA/ TDK ADA	MS/B MS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
19.	Bagi calon yang berstatus sebagai mantan terpidana:																								
	a. Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.																								
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.																								
	c. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana.																								
	d. Bukti berupa surat pernyataan yang telah dimuat dalam media massa.																								
20.	Bagi bakal calon yang berstatus sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara ( <i>culpa levis</i> atau karena alasan politik):																								
	a. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan																								
	b. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan ( <i>culpa levis</i> ) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;																								
	c. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana;																								
	d. Bukti pernyataan atau pengumuman yang dimuat di media massa lokal atau nasional.																								
21.	Fotocopy ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan bagi bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah atas atau sederajat.																								
	<b>KESIMPULAN:</b>																								

**Keterangan:**

**L : Lengkap**

**TL : Tidak Lengkap**

**MS : Memenuhi Syarat**

**BMS : Belum Memenuhi Syarat**



Jakarta, 20 Juli 2018  
Ketua Pokja Pencalonan

tttd.

( NURDIN )

**LAMPIRAN BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**  
**PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

LAMPIRAN  
 MODEL BA.HP.DPRD PROVINSI

**PARTAI**  
**DAPIL**

: GERINDRA  
 : DKI JAKARTA 7

**DOKUMEN SYARAT BAKAL CALON**

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN & KEABSAHAN DOKUMEN																							
		CALON 1		CALON 2		CALON 3		CALON 4		CALON 5		CALON 6		CALON 7		CALON 8		CALON 9		CALON 10		CALON 11		CALON 12	
		ADA/ TDK ADA	MS/ B MS	ADA/ TDK ADA	MS/ B MS	ADA/ TDK ADA	MS/ B MS	ADA/ TDK ADA	MS/ B MS	ADA/ TDK ADA	MS/ B MS	ADA/ TDK ADA	MS/ B MS	ADA/ TDK ADA	MS/ B MS	ADA/ TDK ADA	MS/ B MS	ADA/ TDK ADA	MS/ B MS	ADA/ TDK ADA	MS/ B MS	ADA/ TDK ADA	MS/ B MS	ADA/ TDK ADA	MS/ B MS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Formulir Model BB1 DPRD Provinsi.	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS				
2.	Fotocopy KTP Elektronik WNI.	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS				
3.	Fotocopy Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.	ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	BMS				
4.	Surat keterangan sehat jasmani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah.	ADA	MS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS				
5.	Surat keterangan sehat rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah.	ADA	MS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS				
6.	Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikoterapika, dan zat adiktif dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah atau BNN Prov/BNN Kab./Kota.	TDK ADA	BMS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS				
7.	Fotocopy Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang Masih Berlaku.	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS				
8.	Tanda bukti sudah terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU Kabupaten/Kota	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS				
9.	Formulir Model BB2 DPRD Provinsi.	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS				
10.	Pas foto berwarna terbaru bakal calon, ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk naskah asli ( <i>hardcopy</i> ) dan naskah asli elektronik ( <i>softcopy</i> ).	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	ADA	MS				
11.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian.	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS				
12.	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.	ADA	MS	ADA	MS	TDK ADA	BMS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS	ADA	MS				
13.	Penetapan dari Pengadilan dalam hal terdapat perbedaan nama penulisan bakal calon pada dokumen pengajuan/syarat bakal calon dengan nama bakal calon pada KTP Elektronik.	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS	TDK ADA	BMS				















14.	Bagi bakal calon yang berstatus sebagai anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab./Kota yang dicalonkan partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu sebelumnya:																						
	a. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR/DPRD Provinsi, dan DPRD Kab./Kota																						
	b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri.																						
	c. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.																						
15.	Bagi bakal calon yang berstatus sebagai anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab./Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu sebelumnya tetapi yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kab./Kota wajib menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politik yang diwakili pada pemilu sebelumnya.		TDK ADA	BMS																			
16.	Bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri:																						
	a. Paspor.																						
	b. Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan RI di negara setempat.																						
17.	Keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu serta Panitia Pemilu dan Panitia Pengawas.																						
18.	Bagi calon yang berstatus sebagai gubernur/wakil gubernu/bupati/wakil bupati/walikota/wakil walikota/Kepala Desa/perangkat desa/aparatur sipil negara/anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian/direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada BUMN/BUMD/BUMDes badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara*):																						
	a. Surat pengajuan pengunduran diri.																						
	b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri.																						
	c. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.																						







